



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Juni 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASNAWI**
2. Jabatan : **KOORDINATOR**
3. NHK : **81451**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **13.951.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/210 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 3034 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 606.800.000
3. Tanah Seluas 770 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 413.000.000
5. Tanah Seluas 5328 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 2.619.000.000
6. Tanah Seluas 3772 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.886.000.000
7. Tanah Seluas 7554 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 3.777.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 1194 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
9. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
10. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
11. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	462.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER SUV G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	184.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	14.712.800.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.712.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.